

Globethics Repository



Pendudukan Jepang di Gorontalo

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Hasanuddin
Publisher	Balai Pelestarian Nilai Budaya
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-13 09:26:29
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/159422

PENDUDUKAN JEPANG DI GORONTALO

Hasanuddin

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado
Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan V
Telepon (0431) 855311 / Faksimile. (0431) 864926
Pos-el: anwar_hasanuddin@yahoo.com

Abstrak

Militer Jepang menduduki Gorontalo tanpa melakukan penyerangan militer atau pengeboman. Faktor ini disebabkan pengaruh kerjasama dengan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG). Kerjasama tidak berlangsung lama setelah militer Jepang membubarkan PPPG. Penduduk Gorontalo mengalami masa sulit akibat aturan militer Jepang. Kondisi ini menyebabkan para tokoh masyarakat melakukan penolakan dan mengancam kebijakan politik Jepang. Mereka yang menolak ditangkap untuk menghilangkan pengaruhnya di Gorontalo. Permasalahan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana kebijakan Jepang dan dampaknya bagi PPPG dan penduduk Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analitik yaitu melakukan studi pustaka dengan menguraikan suatu peristiwa ke dalam bagian-bagiannya, dan ditunjang dengan wawancara dalam rangka memahami kehidupan masyarakat Gorontalo.

Kata Kunci: Militer Jepang, Gorontalo, Nani Wartabone, kebijakan

Abstract

Japanese military occupied Gorontalo without military attack or bombing. This factor because influence of co-operation with Government Supreme Direction of Gorontalo (PPPG). Cooperation does not exist for long time after the Japanese military PPPG dissolved. Gorontalo residents had experiencing hard times to Japanese military rule. These conditions lead to the rejection of community leaders and criticized the Japanese policy. Those who refused were arrested to eliminate its influence in Gorontalo. Research issues to answered is how Japanese policy and its impact PPPG and Gorontalo society. This study uses an analytical description by study literature with describing an event into its parts, and is supported by interviews to understand the lives of Gorontalo society.

Keywords: Japanese military, Gorontalo, policy

A. Pendahuluan

Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia. Kekuatan militer Jepang mulai memperlihatkan aksinya setelah melakukan penyerangan secara besar-besaran di Pearl Harbour Hawaii, Hongkong dan Malaya pada 8 Desember 1941 sebagai bagian dari perang Asia Timur Raya. Akibatnya Belanda memutuskan untuk mengikuti jejak sekutunya yaitu Amerika, Inggris, dan Australia dengan menyatakan pula perang terhadap Jepang. Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Jepang adalah menyerang seluruh wilayah kekuasaan sekutu termasuk jajahan Belanda, Amerika, Inggris, dan Australia untuk menguasai wilayah jajahannya di Asia. Pada 10 Januari 1942, Jepang mulai melakukan berbagai penaklukan di wilayah Indonesia, termasuk Kota Manado pada 11 Januari 1942.¹

Sebulan kemudian, militer Jepang memperluas pendudukannya di Gorontalo dan tiba di Pelabuhan Gorontalo pada 26 Februari 1942 di bawah komando Yamai. Disusul pasukan militer ke-2 pada 5 Maret 1942 melalui Pelabuhan Kwandang di

bawah komando Yamada.² Dapat dikatakan Gorontalo merupakan sasaran selanjutnya dalam penaklukan militer Jepang setelah menduduki Manado. Selain itu, masa pendudukan Jepang tidak serentak dialami oleh rakyat Indonesia, demikian pula pada masa berakhirnya pendudukan Jepang.

Sebelum pendudukan Jepang, di Gorontalo telah dibentuk pemerintahan baru bernama Pucuk Pimpinan Pemerintah Gorontalo (PPPG) yang dipimpin oleh Nani Wartabone. Pemerintahan baru ini mendapat dukungan dari partai-partai politik. Setelah mengetahui pendudukan Jepang di Manado, maka PPPG mengirim utusannya ke Manado untuk menjelaskan pembentukan PPPG dan melaporkan tentang penangkapan pejabat dan pegawai pemerintah Belanda di Gorontalo.³

Pada masa pendudukannya, Jepang melakukan kampanye propaganda yang intensif dengan meyakinkan penduduk bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk suatu tatanan baru di Asia. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat mengalami masa sulit, kenyataan-kenyataan ini menimbulkan kekacauan ekonomi, kerja paksa, penyerahan wajib beras. Suasana kritis yang dirasakan penduduk telah menurunkan semangat masyarakat yang menciptakan timbulnya sikap semakin apatis.

Kekuasaan pendudukan Jepang secara keseluruhan menyebabkan penduduk Gorontalo mengalami masa-masa sulit. Penduduk mulai kesulitan memperoleh bahan makanan pokok. Beras, jagung dan barang-barang kelontong yang sebelumnya

¹ Sebelumnya militer Jepang pertama kali menaklukan Kepulauan Tambelan pada 27 Desember 1941, kemudian Balikpapan pada 24 Januari 1942. Selanjutnya Pontianak dan Ambon pada 2 Februari 1942, menyusul Makassar pada 9 Februari 1942 dan Palembang bersamaan dengan jatuhnya Singapura pada 15 Februari 1942. Lihat A.B. Lopian, et al. 1988. *Dibawah pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Orang Yang Mengalaminya*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, hlm. 1. Lihat juga M.C. Riklefs. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Dharmono Hardjowidjono (terj.). *A History Of Modern Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 294.

² Sudirman Habibie, et al. 2004. 23 Januari 1942 dan Nasionalisme Nani Wartabone. Gorontalo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, hlm. 85-86.

³ *Ibid.*, hlm. 83-84.

mudah didapat, kemudian hilang di pasaran.⁴ Bahkan pihak Jepang menjalankan strategi khusus untuk mengamati keadaan sosial dalam kota dengan menempatkan agen-agen di tengah masyarakat. Selama masa pendudukan Jepang telah terjadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, penulisan ini berusaha mengkaji bagaimana kehidupan masyarakat pada masa pendudukan Jepang di Gorontalo sebagai bagian periode sejarah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan membedakan atau menguraikan suatu peristiwa ke dalam bagian-bagian untuk memahami proses kehidupan masyarakat Gorontalo pada masa pendudukan Jepang. Bertolak dari metode yang dipakai di atas, maka penyusunan ini dapat memberikan titik terang kepada permasalahan. Hal ini dapat memberikan sebuah pengertian tentang penelitian kesejarahan sebagai suatu proses, sehingga wajah masyarakat Gorontalo pada masa pendudukan Jepang dapat digambarkan/dimunculkan kembali.

1. Peristiwa 23 Januari 1942

Sejak militer Jepang melakukan penyerangan secara besar-besaran di Pearl Harbour Hawaii, Hongkong, dan Malaya pada 8 Desember 1941 sebagai bagian dari perang Asia Timur Raya, maka Belanda segera mengikuti jejak Sekutu-sekutunya (Amerika, Inggris, dan Australia) dengan menyatakan pula perang terhadap Jepang. Langkah-langkah yang diambil Jepang adalah dengan menyerang seluruh wilayah kekuasaan Sekutu termasuk wilayah jajahannya di Asia. Pada 10 Januari 1942, Jepang mulai melakukan berbagai penaklukan di wilayah Indonesia, termasuk Kota Manado pada 11 Januari 1942.

⁴ *Ibid.*, hlm. 86-87.

Setelah Manado diduduki Jepang, menyebabkan orang-orang Belanda mulai mengungsi ke Poso. Demikian pula berita pendudukan Jepang di Manado menyebabkan pejabat dan pegawai Belanda di Gorontalo mulai terancam akan keselamatannya. Sebelum meninggalkan Gorontalo, mereka merencanakan sabotase dengan membakar bangunan-bangunan vital. Di saat situasi semakin memburuk, pada hari Kamis 15 Januari 1942 kapal motor “Kalolio”, gudang kopra, dan gudang minyak di Pabean dan Talumolo dibakar.⁵

Peristiwa tersebut menyebabkan timbulnya kekecewaan para kaum nasionalis Gorontalo utamanya Nani Wartabone. Kemudian pada malam harinya, mereka melakukan rencana perlawanan terhadap tindakan tentara Belanda. Secara rahasia mereka mengadakan rapat di rumah R.M. Kusno Dhanupojo, Kampung Ipilo, Kota Gorontalo. Hasil rapat diputuskan badan perjuangan pembentukan “Komite 12” yang diketuai Nani Wartabone, R.M. Kusno Dhanupojo (wakil ketua), U.H. Buluati (sekertaris), A.R. Ointu (wakil sekertaris), dan Usman Monoarfa, Usman Hadju, Usman Tumu, A.G. Usu, M. Sugondo, R.M. Dhanuwatijo, Sagaf Alhasni, dan Hasan Badjeber (anggota).⁶

Dalam rapat disepakati untuk menghindari melebarnya pengrusakan dan pembakaran sarana vital lainnya, maka Nani Wartabone memerintahkan untuk menguasai dan menjaga sarana vital di antaranya Jembatan Talumolo, irigasi Lomaya di Tapa, Kantor Pos, dan tempat penimbunan bahan

⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

⁶ Yayasan 23 Januari 1942 bekerja sama dengan IKIP Negeri Manado Cabang Gorontalo. 1981. *Perjuangan Rakyat Di Daerah Gorontalo, Menentang Kolonialisme dan Mempertahankan Negara Prklamasi*. Jakarta: PT. Gobel Dharma Nusantara, hlm. 42-43.

bakar di WSG.⁷ Penjagaan sarana-sarana vital juga melibatkan rakyat, dan hal ini menimbulkan rasa solidaritas untuk melawan kekuatan Belanda di Gorontalo.

Komite 12 merencanakan suatu strategi untuk melumpuhkan kekuatan Belanda. Pada 23 Januari 1942, Nani Wartabone dan Pendang Kalengkongan mengatur siasat untuk menguasai tangsi polisi dan gudang senjata. Demikian pula peran Ardani Ali untuk membujuk kawan-kawannya polisi agar bergabung dengan Nani Wartabone. Beberapa anggota lainnya disiapkan sebagai kurir yang ditugaskan untuk membangkitkan semangat rakyat agar ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian membentuk pasukan inti “hulunga” di Lapangan Boludawa.⁸

Pada subuh hari, Jumat 23 Januari 1942 pasukan Nani Wartabone bersama rakyat mulai melaksanakan rencananya dari Suwawa menuju Kota Gorontalo ($\pm$ 11 kilometer). Dalam perjalanannya, rakyat ikut bergabung menuju Kota. Demikian pula setelah di kota, pasukan Pendang Kalengkongan dan Ardani Ali dari polisi ikut bergabung, bahkan orang Cina dan Arab ikut serta terlibat dalam kegiatan tersebut. Sasaran pertama adalah melumpuhkan tangsi polisi dan menangkap R. Couper (kepala polisi), kemudian penangkapan kontrolir Dancona di rumahnya, asisten residen J. Korn, dan dilanjutkan dengan penangkapan Tuan Petrus. Pagi harinya, asisten residen, kontrolir, Petrus, kepala polisi, dan pegawai pemerintah Belanda berjumlah sekitar 20 orang ditawan di penjara untuk menjaga keamanan dan keselamatannya. Selanjutnya

kaum pribumi yang di penjara dibebaskan oleh pasukan Nani Wartabone.⁹

Setelah penangkapan pejabat dan pegawai pemerintah Belanda, maka Nani Wartabone memerintahkan rakyat untuk menurunkan bendera Belanda dan menggantikannya dengan bendera Merah-Putih. Dalam suasana tersebut, U.H. Buluati (sekertaris Komite 12) memasang bendera Merah-Putih bertuliskan “Indonesia Berparlemen” di dinding depan Kantor Pos.¹⁰

Setelah pengibaran bendera Merah-Putih di Kantor Pos, rakyat berkumpul di lapangan depan rumah asisten residen (rumah jabatan Gubernur sekarang). Di lapangan, Nani Wartabone memimpin upacara yang pertama dilakukan adalah pengibaran bendera Merah-Putih, kemudian dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh para pemuda dan pelajar yang telah menghafal lagu tersebut. Selanjutnya Nani Wartabone dihadapan rakyat memberi pidato singkat:

*“Pada hari ini tanggal 23 Januari 1942 kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita yaitu Merah-Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda sudah diambil alih oleh pemerintah Nasional”.*¹¹

Setelah peristiwa tersebut terdapat permasalahan baru dengan timbulnya kevakuman dalam pemerintahan. Nani Wartabone mengambil inisiatif untuk membentuk pemerintahan baru. Para anggota Komite 12 dan para pribumi dari pegawai pemerintah Belanda diundang

⁷ Laurens Th. Manus, et al. 1991/1992. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Sulawesi Utara*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah, hlm. 14-15.

⁸ Sudirman Habibie, et al, *op.cit.*, hlm. 61-63.

⁹ *Ibid.*, hlm. 67-70.

¹⁰ Yayasan 23 Januari 1942, *op.cit.*, hlm. 45.

¹¹ Sudirman Habibie, et al, *op.cit.*, hlm. 72.

untuk mengadakan rapat di rumah bekas Asisten Residen. Dalam rapat tersebut diusulkan pembentukan pemerintahan baru, namun beberapa peserta utamanya dari pegawai pemerintah Belanda ragu-ragu bahkan beberapa diantaranya menolak gagasan tersebut dan mengharapkan kembalinya pemerintahan Belanda. Keadaan ini menimbulkan ketegangan, sehingga para pemuda menuntut agar yang menolak atau tidak setuju sebaiknya dimasukkan ke penjara. Akhirnya hasil disepakati untuk membentuk pemerintahan baru yang dinamakan “Pucuk Pimpinan Pemerintah Gorontalo” (PPPG) yang diketuai Nani Wartabone.¹² Pusat kegiatan PPPG digunakan gedung perkantoran NV. KIM (Kantor PELNI sekarang).

1. Awal Pendudukan Jepang

Sebelum militer Jepang memasuki Gorontalo, pihak Jepang mengadakan strategi khusus dengan mengirim mata-matanya untuk mengamati keadaan di Gorontalo. Mereka biasanya sering melakukan pengamatan terhadap tempat-tempat tertentu, seperti pasar, tempat-tempat ibadah, dan tempat keramaian lainnya. Beberapa diantaranya menyamar sebagai pedagang, seperti terjadi di Batudaa.¹³

Di pihak lain, Nani Wartabone mengutus wakilnya menghadap militer Jepang di Manado tentang tawanan pejabat dan pegawai Belanda, serta keberadaan PPPG. Pihak militer Jepang memerintahkan agar para tawanan orang Belanda segera dibawa ke Manado. Nani Wartabone mengutus Ardani Ali dan U.H. Buluati mengantar tawanan orang Belanda ke Manado.¹⁴ Bahkan sebelum kedatangan militer Jepang di Gorontalo, pihak PPPG

telah mempersiapkan upacara penyambutan militer Jepang.

Dapat dikatakan bahwa telah terjalin hubungan kerjasama antara pihak militer Jepang dengan PPPG. Tidak mengherankan militer Jepang memasuki Gorontalo tanpa melakukan aksi militernya dengan melaksanakan penyerbuan dan pengeboman seperti terjadi di kota-kota lainnya.

Pada 26 Februari 1942, pihak militer Jepang di bawah komando Yamai tiba Gorontalo dengan menggunakan kapal perang Angkatan Lautnya. Kedatangan militer Jepang disambut oleh Nani Wartabone sebagai Ketua PPPG bersama para anggotanya. Kemudian dilakukan perundingan antara Nani Wartabone dan Yamai memberitahukan kedatangannya untuk melaksanakan kerjasama kedua belah pihak.¹⁵

Dua bulan kemudian, pada 5 Maret 1942 pihak militer Jepang dibawah komando Yamada mendarat di Pelabuhan Kwandang sebagai bagian kunjungan kehormatan kepada PPPG. Pasukan militer Jepang dipimpin Yamada didampingi perwira dan sembilan belas orang stafnya beserta kompi pengawalnya disambut oleh pembesar PPPG. Dalam perjalanan ke Kota Gorontalo, rombongan tersebut diundang makan siang di kediaman *Jogugu* A.Wartabone di Limboto.¹⁶

Walaupun telah terjalin kerjasama antara PPPG dengan militer Jepang, tetapi kedatangan militer Jepang menimbulkan ketakutan penduduk bahkan sebagian memilih mengungsi keluar kampung yang dianggap lebih aman. Namun tidak lama kemudian, penduduk mulai kembali ke kampungnya masing-masing setelah

¹² *Ibid.*, hlm. 75-76.

¹³ Wawancara Yusuf Halalutu, tanggal 27 Desember 2005 di Gorontalo.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83-85.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 85-86.

¹⁶ Yayasan 23 Januari 1942, *op.cit.*, hlm. 64.

mendengar kabar bahwa Gorontalo keadaannya cukup aman.¹⁷

Dalam enam bulan hubungan kerjasama berlangsung antara PPPG dengan militer Jepang, pemerintahan sipil masih berada di bawah kekuasaan Nani Wartabone sebagai pimpinan PPPG. Mulai pada bulan Maret 1942 setiap upacara bendera dikibarkan Merah-Putih berdampingan dengan bendera *Hinomaru* Jepang, demikian pula lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan lagu *Kimigayo* (lagu kebangsaan Jepang). Untuk mempermudah komunikasi antara kedua belah pihak, maka digunakan seorang jurubahasa bernama Sohan yang telah lama menetap di Gorontalo. Kerjasama mulai renggang setelah pihak PPPG menuntut Jepang untuk mengakui Indonesia merdeka.¹⁸

Pada 5 Juni 1942, utusan militer Jepang dari Manado tiba di Gorontalo, mereka membawa instruksi tentang perubahan susunan PPPG yang telah dibentuk. Pada 6 Juni 1942, pemerintahan diambil alih oleh militer Jepang, sehingga PPPG diubah menjadi *Gunco Kaigi* dan Nani Wartabone diangkat sebagai penasihat dengan jabatan *Gunco Kaigi Gico*. Jabatan *Gunco Kaigi Gico* kemudian ditolaknya. Dengan adanya pemerintahan *Gunco Kaigi* secara langsung susunan administratif PPPG telah dihapuskan, demikian pula Dewan Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya dari Komite 12 dibubarkan oleh militer Jepang.¹⁹

2. Politik Pemerintahan Pendudukan Jepang

Pemerintahan *Gunco Kaigi* ternyata hanya berlangsung satu minggu dimulai dari

6-14 Juni 1942, pemerintahan tersebut digantikan dengan *Ken Kanrikan*. Perubahan pemerintahan ini dilakukan untuk menyelaraskan pembagian wilayah yang telah dibuat pada tanggal 8 Maret 1942 sesuai dengan kewenangan pembagian daerah pendudukan militer Jepang. Wilayah Gorontalo di bawah kekuasaan Angkatan Laut (*Kaigun*) Armada Selatan ke-2 yang berkedudukan di Makassar sebagai pusat pemerintahannya disebut *Minseifu* dan membawahi 3 daerah *Minseibu* yaitu Sulawesi, Kalimantan dan Seram.²⁰

Pada pemerintahan pendudukan Jepang tidak mengalami banyak perubahan seperti susunan pemerintahan yang telah dibentuk pemerintah Kolonial Belanda. Perubahan yang mendasar hanya penamaan dalam bahasa Jepang.

Assisten residen sebagai kepala pemerintahan diubah menjadi *Ken Kanrikan* yang dijabat oleh orang Jepang bernama Kinoshita.²¹ Demikian pula jabatan pemerintahan sipil disebut *Gunco*, kepala distrik yang sebelumnya dijabat para *Jogugu* diubah menjadi *Fuku Gunco*, sedangkan kepala onderdistrik yang dijabat *Marsaoleh* digantikan menjadi *Sunco* serta jurutulisnya disebut *Syoki*. Pada tingkat bawah terdapat *taudaa* (kepala kampung) diubah menjadi *Kuco*. Walaupun dalam jabatan terjadi perubahan-perubahan nama sesuai bahasa Jepang, namun dalam kehidupan penduduk masih banyak yang menyebutkan penamaan jabatan yang lama seperti *Jogugu*, *Marsaoleh* dan *Taudaa*.²²

Peranan *Fuku Gunco* (*Jogugu*), *Sunco* (*Marsaoleh*) dan *Kuco* (*Taudaa*) mempunyai peranan penting dan strategis dalam tujuan

¹⁷ Wawancara Rahim Peju Olii, tanggal 21 Desember 2005 di Limboto.

¹⁸ Sudirman Habibie, et al., *op.cit.*, hlm. 86.

¹⁹ Yayasan 23 Januari 1942, *op.cit.*, hlm. 65.

²⁰ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 12.

²¹ Yayasan 23 Januari 1942, *op.cit.*, hlm. 65.

²² Wawancara Yusuf Halalutu, tanggal 27 Desember di Limboto.

pelaksanaan pemerintahan sipil bagi pendudukan Jepang. Para *Bun Ken Kanrikan*, *Sunco* dan *Kuco* dijabat oleh kaum pribumi berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah dan juga sebagai pengontrol penduduk. Kebijakan pemerintahan militer *Kaigun* berpegang pada prinsip memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada, mengusahakan agar mendapat dukungan dari penduduk dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya (Perang Pasifik). Di samping itu tujuan utama pemerintahan militer *Kaigun* adalah meletakkan dasar agar daerah Gorontalo yang telah diduduki dapat memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menjadikannya daerah persediaan tenaga dan makanan (logistik) bagi kebutuhan perang.

Dalam susunan komando militer Gorontalo tetap dijabat oleh Kinoshita bertugas selain mengatur tata pemerintahan juga memulihkan ketertiban dan keamanan di daerah. Dalam tugas ketertiban dan keamanan dibantu oleh Kepolisian (*Keibetai*), bagi kaum pribumi yang diangkat menjadi polisi umumnya direkrut orang Gorontalo dan Minahasa dari para mantan polisi disebut *Jumpo*. Wewenang *Keibetai* hanya terbatas pada ketertiban dan keamanan daerah, sehingga tidak seluas dengan *Kempetai* (Korps Polisi Militer) yang berpusat di Telaga, bertugas mengendalikan semua kegiatan pengawasan serta mengambil tindakan yang terjadi di daerah. Di samping itu terdapat juga *Toketai* (Angkatan Laut) kantor pusat di Kota (depan lapangan kota) mempunyai tugas membantu menjaga keamanan daerah. *Toketai* dikenal perilakunya ramah, sehingga dengan mudah dapat membaur dan lebih dekat dengan kehidupan penduduk. Dalam pasukan *Toketai* terdapat data yang menarik bahwa selain militer Jepang terdapat juga militer Korea yang ikut membonceng pendudukan

Jepang di Gorontalo. Tugas *Toketai* dari Korea sama dengan apa yang dikerjakan oleh teman-temannya dari Jepang.²³

Sehubungan dengan masih berlangsungnya Perang Asia Timur Raya yang semakin melemahkan posisi Angkatan Perang Jepang, telah mendorong diperlukannya tenaga-tenaga pribumi. Kebijakan itu diambil sebagai akibat pengumuman *Saiko Shikikan* dan timbulnya berbagai serangan pihak Sekutu di Samudera Pasifik yang telah memukul mundur pihak militer Jepang.²⁴ Berkembangnya peperangan dalam konteks militer yang terus-menerus mengakibatkan banyak jatuh korban di pihak militer Jepang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk mengangkat para pemimpin dari kaum pribumi bertujuan untuk membantu memobilisasi penduduk dalam propaganda perang melawan imperialisme (Sekutu).

Kenyataannya selama berlangsungnya pemerintahan *Ken Kanrikan* Kinoshita mengalami kekurangan tenaga administrasi dan beberapa kekosongan jabatan menengah akibat penghapusan PPPG. *Ken Kanrikan* Kinoshita selanjutnya mengangkat kembali pegawai-pegawai pribumi yang dahulunya juga menjadi pegawai administrasi PPPG.²⁵

²³ Wawancara Yusuf Halalutu, 27 Desember 2005 di Limboto

²⁴ Pada 16 Juni 1942, dalam Sidang Istimewa ke-82 Parlemen Tokyo, ditegaskan oleh Perdana Menteri Tojo tentang keputusan pemerintah Jepang mengenai pemberian kesempatan kepada pribumi (Indonesia) untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Pada 1 Agustus 1943 direalisasikan melalui pengumuman *Saiko Shikikan* tentang garis-garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintahan negara yang meliputi badan-badan pertimbangan di daerah dan pusat serta jabatan-jabatan tinggi untuk orang-orang Indonesia sebagai penasehat pada pemerintahan militer. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto., *op.cit.*, hlm. 13.

²⁵ Wawancara Yusuf Halalutu, 22 Desember 2005 di Gorontalo.

Kesempatan ini disatu pihak memberi kesan kepada penduduk Gorontalo bahwa kaum pribumi berpartisipasi dalam pemerintahan militer Jepang dan memberi harapan hubungan komunikasi dengan penduduk dapat lebih luas, di pihak lain kaum pribumi yang diangkat menjadi pegawai mendapat pengalaman baru sistim pemerintahan militer Jepang.

Pelaksanaan tata pemerintahan antara wewenang tugas pegawai pribumi dan Jepang hampir dikatakan tidak ada, kesulitan umum para pegawai pribumi berkisar pada masalah “ketertutupan” pegawai Jepang sebagai pejabat tinggi. Praktis semua kebijakan ditentukan oleh para pegawai Jepang, sehingga seringkali terjadi kesenjangan di antara keduanya dengan sistem yang kaku dalam lingkungan kerja. Para pegawai pribumi juga diajarkan berbahasa Jepang, semangat Jepang dengan kecenderungan mengagung-agungkan kebesaran dan keunggulan Jepang serta adat-istiadat Jepang.²⁶

Begitupula dalam pemerintahan sipil, *Fuku Gunco* (*jogugu* atau kepala distrik) dan *Sunco* (*marσαoleh* atau kepala onderdistrik) dibatasi kebebasannya keluar Gorontalo. Hal ini disebabkan timbulnya kecurigaan militer Jepang terhadap mereka yang mempunyai pengaruh yang cukup luas di tengah masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan *Jogugu* terbatas hanya mengumpulkan pendapatan hasil-hasil bumi dan pendapatan lainnya dari *Marsaoleh* dan *Taudaa*. Kadangkala *Marsaoleh* dan *Taudaa* mengontrol ke berbagai kampung untuk mengamati kehidupan penduduk, apalagi kesibukannya bertambah setelah munculnya kekurangan bahan makanan beras bagi penduduk.

Pada tahun 1943 pendudukan militer Jepang mengalami kemunduran akibat berlangsungnya Perang Asia Pasifik, pihak militer Jepang beralih dari posisi ofensif menjadi defensif. Pihak militer Jepang berusaha mendapatkan tambahan kekuatan militer dari rakyat dengan cara merekrut tenaga-tenaga yang memiliki kecakapan militer. Kedudukannya mulai terancam akan masuknya tentara Sekutu—di Pasifik Tengah armada Amerika mulai mendekati Filipina dan beberapa front Pasifik lainnya.²⁷ Pemerintah militer Jepang melalui *Ken Karinkan Gorontalo* berusaha dapat memobilisasi penduduk dengan melakukan suatu pendekatan baru terhadap *Marsaoleh* dan *Taudaa* untuk pengerahan militer bagi pemuda-pemuda Gorontalo.

3. Dampak Pendudukan Jepang Terhadap Kehidupan Masyarakat

Pada 6 Juni 1942, militer Jepang mulai memperlihatkan aksinya dengan mengeluarkan keputusan untuk menghapus pemerintahan PPPG. Langkah awal diambil militer Jepang dengan memusnahkan pengaruh-pengaruh Barat melalui pembentukan pemerintahan *Ken Karinkan* di Gorontalo. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 memperlihatkan campur tangan pendudukan militer Jepang sampai ke tingkat bawah dengan memuat hanya bendera Jepang yang dikibarkan pada hari-hari besar dan lagu kebangsaan hanyalah lagu *Kimigayo*. Selanjutnya dikeluarkan peraturan baru bahwa mulai 29 April 1942, tarikh yang harus dipakai adalah tarikh Jepang (*Sumera*) dan tahun 1942 Masehi sama dengan tahun 2602 *Sumera*. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah militer Jepang mencerminkan proses penyebaran kebudayaan Jepang bagi kaum pribumi Gorontalo.

²⁶ Wawancara Yusuf Halalutu, 22 Desember 2005 di Gorontalo.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9.

Kebijakan *Ken Karinkan* Kinoshita dalam memusnahkan pengaruh Belanda dilakukan melalui kampanye propaganda yang intensif untuk meyakinkan penduduk Gorontalo bahwa bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur dalam membentuk satu tatanan baru di Asia. Akan tetapi upaya propaganda sering mengalami kegagalan karena adanya kenyataan-kenyataan militer Jepang sering melakukan teror dari *Kembeitai* (Kepolisian) dan *Kempeitai* (Korps Polisi Militer), kerja paksa, kesombongan dan kekejaman orang-orang Jepang—berbagai pemukulan dan pemberian hormat—yang berlebihan mendorong penduduk mulai menentang pendudukan Jepang di Gorontalo.

Aparat *Kembetai* dan *Kempeitai* anggotanya berasal dari serdadu polisi Jepang dan pribumi, mereka bertugas menjaga tempat-tempat tertentu dan sarana vital yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kepentingan Jepang di Gorontalo, di samping itu mengendalikan semua kegiatan pengawasan serta mengambil tindakan yang terjadi di daerah dan penahanan terhadap kaum pribumi yang dicurigai menentang pendudukan Jepang, sehingga sering terjadi berbagai kekerasan dan penindasan di dalam kota. *Kempeitai* mempunyai konotasi buruk di kalangan masyarakat Gorontalo. Bagi penduduk banyak menghindari *Kempeitai* karena adanya rasa takut akan kekejaman yang dilakukannya, begitupula menghindari tempat-tempat yang dijaga polisi Jepang.

Penduduk yang pernah berurusan dengan *Kembetai* dan *Kempeitai* merasakan penganiayaan dan penindasan, mereka sering membentak dengan kata-kata kasar “*bagero*” (seharusnya *bakayaro*, tetapi umumnya disalahucapkan orang Gorontalo menjadi *bagero* artinya bangsat atau bodoh). Demikian pula banyak perbuatan dan tindakan yang sulit dimengerti penduduk, di

antaranya keharusan *seikerei* (memberi hormat kepada Kaisar Jepang di waktu pagi manakala memulai kegiatan dengan menghadap matahari), selain itu bagi setiap penduduk yang berpapasan dengan orang Jepang dan polisi Jepang harus terlebih dahulu membungkukkan badan memberi hormat. Bagi golongan bawah, ketentuan tersebut dianggap sesuatu yang tidak memberatkan, namun bagi golongan tertentu soal menghormat secara berlebihan merupakan suatu siksaan tersendiri.

Dalam rangka menopang upaya perang Jepang dengan Sekutu dan rencana-rencananya bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur Raya (Perang Asia Pasifik), maka pihak militer Jepang membutuhkan sumber-sumber alam untuk keperluan perangnya. Tenaga kerja penduduk secara sukarela mulai dikerahkan oleh para kepala kampung seperti pembuatan jalan antarkota, jalan Gorontalo-Manado, lapangan udara Isimu, dan lainnya tanpa mendapatkan upah dan makanan, sehingga penduduk dengan sendirinya membawa perbekalan makanan.²⁸

Dalam banyak hal kesulitan kehidupan penduduk Gorontalo lebih banyak disebabkan oleh ketentuan penguasa pendudukan militer Jepang itu sendiri. Kelihatannya pihak militer Jepang melakukan penekanan terhadap penduduk lewat sektor yang paling vital utamanya beras, sehingga dikeluarkan ketentuan berupa pembatasan memiliki beras untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga. Tidak mengherankan makanan pokok beras sering menghilang di pasaran, walaupun ada sangat sulit didapatkan karena biasanya pedagang beras takut menjual berasnya. Kehidupan penduduk yang semakin “hidup

²⁸ Wawancara Rahim Peju Olii, tanggal 21 Desember 2005 di Limboto, dan wawancara Yusuf Halalutu, tanggal 27 Desember 2005 di Limboto.

susah” bukan hanya berlaku bagi golongan bawah tetapi juga golongan atas mulai mengalaminya. Dalam kebutuhan makan penduduk, mereka hanya memakan nasi dicampur jagung, nasi dicampur ubi, dan ubi dicampur jagung. Untuk kebutuhan akan sayur-sayuran mereka menanam di pekarangan rumahnya. Untuk bahan sandang, mereka membuat pakaian dengan menenunnya, itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut jika diketahui oleh militer Jepang akan mendapat hukuman.²⁹

Kehidupan penduduk semakin susah disebabkan sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok sehari-hari, selanjutnya pihak pendudukan Jepang mengambil langkah-langkah untuk membentuk ekonomi perang dengan mengerahkan penduduk untuk wajib menanam kapas, padi, dan ubi-ubian. Walaupun demikian di sisi lain, pihak Jepang juga mengajarkan cara-cara penanaman kapas dan padi yang baik, sebelumnya penduduk Gorontalo menanam padi secara semrawut dan tidak teratur. Pihak Jepang memberi cara menanam padi secara teratur dengan memakai tali, sehingga tanaman padi kelihatan lurus. Demikian pula, cara menanam ubi-ubian yang dilakukan orang Gorontalo dengan menancapkan bibit batang ubi cukup dalam dengan harapan umbinya banyak, kemudian Jepang memberi cara menanam ubi yang tidak perlu terlalu dalam dan ternyata memberi hasil yang cukup besar.³⁰

Salah satu peristiwa yang cukup menggemparkan penduduk Gorontalo adalah pemancungan Ali Palalu dan Kasim bersama keluarganya pada bulan Maret 1943, sehubungan dengan peraturan kewajiban menanam kapas dan larangan membawa

beras dari satu desa ke desa lain. Ali Palalu dan Kasim membawa beras sekitar 80 liter dari Kwandang, mereka diperiksa oleh *Kembeitai* (polisi) di Limboto yang sering mengadakan pemeriksaan di jalan, setelah diketahui Ali Palalu dan Kasim membawa beras, maka pihak *Kembeitai* memerintahkan untuk menyerahkan berasnya, namun permintaan itu ditolak oleh Ali Palalu dan Kasim, sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian dan mengakibatkan meninggalnya dua polisi (kepala polisi dari Minahasa dan orang Gorontalo) kemudian Ali Palalu dan Kasim beserta tiga anggota keluarganya ditangkap setelah menyerahkan diri.³¹

Setelah diputuskan hukuman pancung oleh militer Jepang, maka dilaksanakan hukuman tersebut di depan umum dan Nani Wartabone diminta militer Jepang untuk menyaksikan pemancungan itu. Setelah menyaksikan pemancungan tersebut, Nani Wartabone marah, kecewa dan terharu atas keputusan itu, sehingga dengan teman dekatnya Sinyo Hasan, beliau mengatakan “Inilah yang aku tidak suka pada Jepang”.³² Kekecewaan Nani Wartabone disebabkan tindakan militer Jepang yang dilakukan dengan cara sadis dan kejam di depan rakyatnya.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat serba susah, penduduk mulai hidup dengan ketakutan dan penindasan menyebabkan munculnya ketidaksenangan beberapa tokoh masyarakat. Kelihatannya pihak militer Jepang menjalankan strategi khusus untuk mengamati keadaan sosial dalam kota melalui *mite* (mata-mata atau agennya). Para *mite* umumnya pribumi disebarkan di dalam masyarakat untuk mencari informasi keadaan penduduk.

²⁹ Wawancara Doris Tongkodu, tanggal 25 Desember 2005 di Limboto.

³⁰ wawancara Yusuf Halalutu, tanggal 27 Desember 2005 di Limboto.

³¹ Wawancara Yusuf Halalutu, tanggal 27 Desember 2005 di Limboto.

³² Sudirman Habibie, et al., *op.cit.*, hlm. 87.

Pada 30 Agustus 1943, pimpinan Angkatan Laut bernama Mori ke Gorontalo, dalam kunjungannya Mori mengajak Nani Wartabone untuk bekerjasama. Kemudian Nani Wartabone mengajukan tuntutan jaminan akan Indonesia Merdeka, pengibaran bendera Merah-Putih, serta menghilangkan tekanan militer Jepang sebagai bagian dari kerjasama tersebut. Pengajuan tawaran Nani Wartabone menyebabkan timbulnya kekecewaan bagi Mori dan mengancam akan keselamatannya. Berdasarkan pertemuan tersebut pada bulan Desember 1943, Nani Wartabone bersama beberapa *Jogugu* ditangkap oleh militer Jepang. Mereka diasingkan ke Manado untuk menghilangkan pengaruhnya di Gorontalo. Di Manado mereka disiksa dengan kaki sampai leher ditanam di tepi pantai. Dalam penyiksaannya, beberapa *Jogugu* meninggal dunia di antaranya Rasyid Monoarfa, Datau, dan Hippy. Setelah menjalani masa penahanan selama enam bulan, beliau dibebaskan pada 6 Juni 1944. Setelah mengetahui berita atas kekalahan Jepang, maka pada 15 Agustus 1945, Nani Wartabone menerima pemerintahan dari militer Jepang yang dipimpin Khinosisita. Keesokan harinya dilaksanakan upacara penaikan bendera Merah-Putih di depan Kantor *Ken Kanrikan* (rumah jabatan Gubernur sekarang).

Peristiwa tersebut menunjukkan berakhirnya pendudukan militer Jepang di Gorontalo. Penduduk Gorontalo telah merebut kembali kebebasannya dalam arti mengurus kembali pemerintahannya dengan menjadi penguasa di daerahnya sendiri. Hal ini kemudian dibuktikan pada 5 Nopember 1945 dibentuk sebuah badan “Dewan Nasional”, bertugas untuk merancang urusan pembangunan negara dan kepala daerah.³³

4. Penutup

Sebelum pendudukan Jepang di Gorontalo, telah terjadi peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Peristiwa dikenal dengan 23 Januari 1942 atau Peristiwa Merah-Putih. Munculnya peristiwa ini disebabkan adanya sabotase dan pembakaran bangunan-bangunan vital oleh pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan munculnya rasa nasionalisme untuk mengamankan bangunan vital lainnya.

Rakyat Gorontalo yang dipimpin Nani Wartabone melakukan perlawanan dengan menangkap orang Belanda, baik pejabat maupun para pegawainya. Kemudian Nani Wartabone mengadakan rapat umum di lapangan kota dengan melakukan pengibaran bendera Merah-Putih untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah upacara, para tokoh nasionalis langsung membentuk sebuah pemerintahan baru disebut “Pucuk Pimpinan Pemerintah Gorontalo” (PPPG) diketuai Nani Wartabone hingga kemudian masuknya pendudukan militer Jepang.

Pada awal kedatangan militer Jepang terjadi kerjasama dengan PPPG, sehingga Jepang menduduki Gorontalo tanpa melakukan penyerangan militer atau pengeboman seperti yang terjadi di kota-kota lainnya. Namun, kerjasama ini tidak berlangsung lama setelah militer Jepang membubarkan PPPG.

Langkah ini menjadi awal pendudukan Jepang, dalam kehidupan masyarakat mengalami masa sulit. Kenyataan ini menimbulkan kekacauan ekonomi, kerja paksa dan penyerahan wajib beras, kekejaman militer Jepang pada umumnya, dan kewajiban memberi hormat kepada setiap orang Jepang. Walaupun masa

³³ Yayasan 23 Januari 1942, *op.cit.*, hlm. 60.

pendudukan Jepang telah meninggalkan penderitaan, namun telah memberi pengalaman baru bagi penduduk Gorontalo tentang cara menanam padi dan ubi yang lebih baik, dan cara menanam kapas.

Kondisi sosial ekonomi penduduk mengalami serba susah, penduduk mulai hidup dengan ketakutan dan penindasan menyebabkan munculnya ketidaksenangan tokoh masyarakat. Nani Wartabone dan beberapa *Jogugu* ditangkap. Mereka diasingkan ke Manado, untuk menghilangkan pengaruhnya di Gorontalo. Dalam penawannya, mereka disiksa dan, beberapa *Jogugu* meninggal dunia. Pada 6 Juni 1944 (dalam penahanan) Nani Wartabone dibebaskan. Setelah mengetahui berita atas kekalahan Jepang, maka pada 15 Agustus 1945, Nani Wartabone menerima pemerintahan militer Jepang yang dipimpin Khinosita. Keesokan harinya dilaksanakan upacara penaikan bendera Merah-Putih di depan Kantor *Ken Kanrikan* (sekarang rumah jabatan Gubernur).

DAFTAR PUSTAKA

- Lapian, A. B., et al. 1988. *Dibawah pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Orang Yang Mengalaminya*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. Penerbitan Sejarah Lisan No. 4.
- Laurens Th. Manus, et al. 1991/1992. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Sulawesi Utara*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah.
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Dharmono Hardjowidjono (terj.). *A History Of Modern Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudirman Habibie, et al. 2004. 23 *Januari 1942 dan Nasionalisme Nani Wartabone*. Gorontalo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
- Yayasan 23 Januari 1942 bekerja sama dengan IKIP Negeri Manado Cabang Gorontalo. 1981. *Perjuangan Rakyat Di Daerah Gorontalo, Menentang Kolonialisme dan Mempertahankan Negara Prklamasi*. Jakarta: PT. Gobel Dharma Nusantara.